

## **Transformasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dari Kurikulum Tahun 1962 Hingga Kurikulum Merdeka**

**Sri Yunita<sup>1</sup> Anggun Adelita<sup>2</sup> Santi Theresia Sinurat<sup>3</sup> Tesa Novia Siburian<sup>4</sup>**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [sr.yunita@unimed.ac.id](mailto:sr.yunita@unimed.ac.id)<sup>1</sup> [anggunadelita4@gmail.com](mailto:anggunadelita4@gmail.com)<sup>2</sup> [santisnrt00@gmail.com](mailto:santisnrt00@gmail.com)<sup>3</sup> [tesasiburian46@gmail.com](mailto:tesasiburian46@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstract**

*The aim of this research is to describe the transformation and material of Pancasila and Citizenship education from the 1962 curriculum to the Merdeka curriculum. This research applies descriptive type qualitative research methods, using a literature study approach. The research results show that the transformation of Pancasila and Citizenship Education has undergone changes, namely in 1962, 1968, 1975, 1994, 2004, 2006, 2013, the Merdeka Curriculum. Curriculum development has become an important means in efforts to improve the quality of education, where curriculum development policies reflect the level of the quality of a country's education. Future education must be planned to address the expectations and challenges arising from change, with a sustainable education system, from preschool to higher education. The Pancasila and Citizenship Education (PPKn) curriculum in Indonesia has developed dynamically, which in principle is adapted to the needs and vision and mission of the government which influences national education curriculum policy.*

**Keywords:** *Changes, Curriculum, PPKn*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Transformasi dan Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kurikulum tahun 1962 hingga kurikulum Merdeka. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif, dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transformasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sudah mengalami perubahan yaitu pada tahun 1962, 1968, 1975, 1994, 2004, 2006, 2013, Kurikulum Merdeka. Pengembangan kurikulum menjadi sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, di mana kebijakan pengembangan kurikulum mencerminkan tingkat kualitas pendidikan suatu negara. Pendidikan di masa depan harus direncanakan untuk mengatasi harapan dan tantangan yang timbul akibat perubahan, dengan sistem pendidikan yang berkelanjutan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia telah berkembang secara dinamis, yang pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi pemerintah yang mempengaruhi kebijakan kurikulum pendidikan nasional.

**Kata Kunci:** Perubahan, Kurikulum, PPKn



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah sudah banyak mengalami transformasi, transformasi perkembangan perubahan pembelajaran pendidikan pancasila sangat penting dalam meningkatkan pembelajaran pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. Transformasi yang awalnya merupakan konsep dalam ilmu eksakta, kini telah diperkenalkan ke dalam domain ilmu sosial dan humaniora. Istilah ini mengacu pada perubahan bentuk, baik fisik maupun nonfisik, seperti karakteristik, sifat, atau atribut lainnya. Dalam konteks ensiklopedia nasional Indonesia, transformasi dipahami sebagai perubahan menyeluruh yang mencakup bentuk, sifat, watak, dan aspek lainnya, baik

dalam konteks hubungan individu maupun kelompok (Rinawati 2015). Pendidikan dianggap sebagai elemen krusial yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu negara. Pengembangan kurikulum menjadi sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pengembangan kurikulum mencerminkan tingkat kualitas pendidikan suatu negara (Daga 2020). Pendidikan ke depan harus direncanakan untuk mengatasi harapan dan tantangan yang timbul akibat perubahan-perubahan. Sistem pendidikan yang dibentuk haruslah bersifat berkelanjutan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi (Muhammedi 2016).

Salah satu alasan utama perubahan kurikulum adalah faktor internal, seperti kondisi delapan standar nasional pendidikan yang sudah ada dan perubahan demografi Indonesia menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan. Selain itu, ada juga faktor eksternal yang mendorong, seperti persiapan Indonesia menghadapi era globalisasi dan keterlibatan dalam riset internasional terkait bahasa, matematika, dan sains. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggambarkan alasan ini sebagai poin utama dalam penyusunan dan penyesuaian kurikulum 2013, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pencapaian kompetensi siswa di sekolah (Siregar 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe deskriptif, menggunakan pendekatan tipe studi kepustakaan. Menurut Syaibani (2012), studi kepustakaan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Informasi tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti buku ilmiah, laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, serta sumber tertulis lainnya baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik (A. Azizah 2017). Dinyatakan bahwa dalam penelitian kepustakaan, data diperoleh dari berbagai sumber perpustakaan seperti buku, ensiklopedia, jurnal, kamus, dokumen, majalah, dan lainnya. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap sejumlah jurnal, buku, dokumen, serta sumber data dan informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian.

Dalam buku "Metode Penelitian Kepustakaan" karya Mestika Zed, terdapat empat langkah yang harus diikuti dalam melakukan penelitian kepustakaan. Pertama, persiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti pensil atau pulpen, serta kertas catatan. Kedua, susun daftar pustaka, yang merupakan catatan mengenai sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber daftar pustaka ini sebagian besar berasal dari koleksi perpustakaan yang tersedia. Ketiga, atur waktu dengan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu yang dimiliki, bisa berupa perencanaan harian atau bulanan sesuai preferensi masing-masing individu. Keempat, baca dan buat catatan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat terorganisir dengan baik dan tidak menyulitkan dalam menghadapi banyaknya sumber bacaan yang beragam (Ahaatibah 2011).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pembelajaran pancasila dan Kewarganegaraan sudah mengalami perubahan yang dimulai dari tahun 1962. Pendidikan kewarganegaraan secara resmi diperkenalkan dalam kurikulum sekolah di Indonesia melalui penambahan mata pelajaran civic pada kurikulum SMA tahun 1962. Mata pelajaran tersebut mencakup materi mengenai pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada UUD 1945. Kurikulum ini, mengalami perubahan pada tahun 1968 (Angraini 2017). Perubahan pada tahun 1968 ini, yang awalnya mata pelajarannya ialah

Civic menjadi Pendidikan Kewargaan Negara(PKN). Kajian tentang pendidikan kewarganegaraan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan. Pada tingkat sekolah dasar, Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencakup program pembelajaran seperti Sejarah Indonesia, Civics, dan Ilmu Bumi. Di tingkat SMP, mata pelajaran tersebut mencakup materi Sejarah Kebangsaan (30%), Peristiwa Pasca Kemerdekaan Indonesia (30%), dan UUD 1945 (40%). Sementara itu, di tingkat SMA, fokus pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagian besar terpusat pada UUD 1945. Pada tahun 1975 kurikulum tersebut mengalami perubahan (Suharjo 2020). Perubahan pada tahun 1975 mengalami perubahan yang awalnya mata pelajaran ialah Pendidikan Kewargaan Negara(PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila(PMP).

Pendidikan Moral Pancasila(PMP) Materi-materi yang disajikan dalam pokok bahasan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam Kurikulum 1975 memiliki nuansa yang kental dengan subjek Civics, seperti yang terdapat dalam Kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, pendekatan tujuan digunakan untuk mengembangkan susunan materi PMP. Contoh penjabaran materi PMP dalam butir-butir pokok bahasan pada Kurikulum 1975 menunjukkan bahwa materi Civics meliputi Sejarah Kebangsaan, Kejadian setelah Indonesia merdeka, dan UUD 1945. Selain itu, secara eksplisit, nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila dan pesan-pesan pentingnya pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun dan GBHN, dimasukkan ke dalam kurikulum tersebut. Pada tahun 1994 kurikulum ini mengalami perubahan (Suharjo 2020). Kurikulum pada Tahun 1994 didasarkan pada Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nomenklatur jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan dalam Kurikulum 1994 adalah PPKn. PPKn Kurikulum 1994 bertujuan untuk mendidik dan mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Materi PPKn pada Kurikulum 1994 sedikit berbeda dengan materi yang terdapat pada PMP, hanya terdapat beberapa materi tambahan terkait sistem ketatanegaraan. Isi materi PPKn pada silabus tahun 1994 menunjukkan pembelajaran moral Pancasila pada silabus PMP tahun 1984. Kurikulum ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 2004. (Usmi and Samsuri 2022).

Pada tahun 2004 Perubahan yang dialami yaitu pada tingkat Sekolah Dasar, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disatukan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS). Akan tetapi, PKn di Sekolah Menengah Pertama(SMP) dan Sekolah Menengah Atas(SMA) pada umumnya tidak dikaitkan dengan IPS, melainkan berdiri sendiri sebagai PKn. Pada kurikulum ini materi pembelajaran PKn yaitu kurikulum kewarganegaraan berbasis kompetensi tampaknya telah menghasilkan tiga unsur pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas, sebagaimana diusulkan oleh Pusat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Standar Nasional untuk Kewarganegaraan dan Pemerintahan tahun 1999. Tiga komponen tersebut ialah civic knowledge (pengetahuan tentang kewarganegaraan), civic skills (keterampilan kewarganegaraan), dan civic disposition (kepribadian civic ).Pada tahun 2006 kurikulum ini mengalami perubahan (Suharjo 2020).

Perubahan pendidikan pada tahun 2006 Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan dijelaskan sebagai mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara Indonesia yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Tujuan dari pelajaran ini adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1)Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. (2)Berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, dan bertindak cerdas dalam kegiatan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan, serta memiliki sikap anti korupsi. (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakteristik masyarakat Indonesia agar dapat hidup

berdampingan dengan bangsa lain. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam konteks globalisasi dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter, dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada tahun 2013 kurikulum ini mengalami perubahan (Gandamana and Simanjuntak 2018).

Perubahan pada tahun 2013 yaitu Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keimanan dan akhlak mulia, sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sehingga mampu berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara menyeluruh mencakup empat pilar kebangsaan yang saling terkait: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika (Rahmayani 2016). Kurikulum 2013 masih diberlakukan hingga saat ini, namun implementasinya mungkin berbeda-beda di setiap wilayah atau sekolah, sehingga hanya sebagian dari mereka yang masih menerapkannya. Kurikulum Merdeka juga merupakan evolusi dari Kurikulum 2013. Hal ini sesuai dengan penegasan guru PPKn bahwa penerapan Kurikulum Merdeka merupakan evolusi dari Kurikulum sebelumnya (Kurikulum 2013) dan akan diterapkan pada Kurikulum .Diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada tahun 2022. Tujuan dari Kurikulum merdeka adalah untuk memulihkan pandemi influenza yang disebabkan oleh virus Covid-19. Tujuan pengembangan kurikulum ini adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada anak Indonesia seperti anak di negara maju. Penerapan Kurikulum Merdeka yang berbasis kompetensi dan karakter bertujuan untuk membekali siswa dengan berbagai keterampilan yang berkaitan dengan kebutuhan dunia modern, kemajuan teknologi, dan inovasi seni agar mampu menghadapi tantangan tersebut yang dipengaruhi oleh globalisasi dan beradaptasi dengan dunia di sekitar mereka (Azizah and Prasetyo 2023).

## **KESIMPULAN**

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang signifikan. Transformasi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta konsep kewarganegaraan di lingkungan sekolah. Pendidikan dipandang sebagai komponen krusial yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu negara. Pengembangan kurikulum menjadi sarana penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, di mana kebijakan pengembangan kurikulum mencerminkan tingkat kualitas pendidikan suatu negara. Pendidikan di masa depan harus direncanakan untuk mengatasi harapan dan tantangan yang timbul akibat perubahan, dengan sistem pendidikan yang berkelanjutan, mulai dari prasekolah hingga pendidikan tinggi. Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia telah berkembang secara dinamis, yang pada prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan serta visi-misi pemerintah yang mempengaruhi kebijakan kurikulum pendidikan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kekuatan mendasar yang menjadi fondasi mata pelajaran PPKn, meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik, hukum, nilai, moral, kearifan lokal, dan kebhinekaan dalam berkebudayaan.

Saran: Sebagai akademisi di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sangat penting untuk menunjukkan antusiasme dan respons yang cepat terhadap perkembangan kurikulum PPKn. Oleh karena itu, disarankan kepada para akademisi secara umum, dan khususnya dalam bidang PPKn, untuk tetap memantau dengan cermat perubahan-

perubahan yang terjadi pada kurikulum di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam artikel ini, perubahan kurikulum berlangsung dengan dinamis dan cepat, hampir semua mata pelajaran terkena dampak dari perubahan yang dinamis tersebut, termasuk bidang PPKn. Oleh karena itu, para akademisi PPKn seharusnya menjadi pihak yang paling awal untuk mengawasi dan mengikuti proses perkembangan ini. Dengan demikian, para akademisi PPKn diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan masukan yang konstruktif terkait perkembangan kurikulum PPKn di Indonesia. Hal ini penting agar kurikulum PPKn dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman serta tuntutan perkembangan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahaatibah. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra*, 2011: 36-39.
- Angraini, Rita. "Karakteristik Media yang Tepat dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai." *Journal Of Moral And Civic Education*, 2017: 14-26.
- Azizah, Ainul. "Studi Kepustakaan Mengenai landasan Teori dan Praktik Konseling Narativ." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 2017: 1-7.
- Azizah, Shofi Nur, and Wibowo Heru Prasetyo. "Profil Pelajar pancasila dalm Kurikulum Merdeka: Persepsi dan Harapan Pengajar PPKn." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2023: 5375-5383.
- Daga, Agustinus Tanggu. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar(Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 hingga kebijakan merdeka belajar)." *Jurnal Edukasi Sumba*, 2020: 103-110.
- Gandamana, Apiek , and Sorta Simanjuntak. "Perbandingan Kompetensi Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar." *Jurnal Sekolah*, 2018: 17-22.
- Muhammedi. "Perubahan Kurikulum di Indonesia : Studi Kritis tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal." *Raudhah*, 2016: 49-70.
- Rahmayani. "Implementasi Manajemen Pembelajaran PPKn Kurikulum 2013." *Manajer Pendidikan*, 2016: 143-148.
- Rinawati, Anita. "Transformasi Pendidikan Untuk Menghadapi Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2015: 93-103.
- Siregar, Waliyul Maulana. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Purwokero, Jawa Tengah: PT>Pena Persada Perta Utama, 2023.
- Suharjo. "Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn :dari rentjana Pelajaran 1947-Merdeka Belajar 2020." *PKN Progresif*, 2020: 64-82.
- Usmi, Rianda, and Samsuri. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Global, dalam Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Abad 21." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan*, 2022: 149-160.